

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH PUSAKO KAUM DALAM
KELUARGA YANG BELUM TERDAFTAR DI KOTA PARIAMAN**



2024PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH PUSAKO KAUM DALAM KELUARGA YANG BELUM TERDAFTAR DI KOTA PARIAMAN

(Dino Alfarisi Putra, 2020123018, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 88 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Harta warisan atas tanah yang belum disertipikatkan, cara hukum dalam melindungi hak atas tanah tersebut salah satunya yaitu dengan mengakui alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat dibawah tangan. Meskipun pengakuan terhadap 2 alat bukti tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna jika dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pendaftaran tanah. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 1) Mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak belum terdaftar di Kantor Pertanahan? 2) Bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil temuan penulis yaitu Penyebab tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, yaitu adanya anggapan bahwa sertipikat hak atas tanah tidak penting, sulitnya mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga, sulitnya mendapatkan persetujuan dari Ketua KAN, tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung dibebankan pajak, adanya anggapan bahwa tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung menjadi konflik dan sengketa dalam keluarga. Pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan proses administrasi, yaitu ahli waris secara langsung dapat melakukan penguasaan fisik bidang tanah pusako kaum tersebut. Proses administrasi dalam pemerintahan terjadi ketika pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar, akan didaftarkan oleh ahli waris ke kantor pertanahan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah kepada ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, diberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu pertama perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk melakukan pendaftaran dan kedua perlindungan hukum secara represif dalam bentuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Pusako Kaum, dan Belum Terdaftar.

UNTUK

BANGSA

LEGAL PROTECTION OF UNREGISTERED FAMILY HEIRLOOM LAND IN PARIAMAN CITY

(Dino Alfarisi Putra, 2020123018, *Master of Notary Postgraduate Program, Andalas University, 88Pages, 2024*)

ABSTRACT

Inheritance of land that has not been certified, one of the legal ways to protect the rights to the land is by admitting evidence in the form of witness statements or private letters. Although the recognition of these 2 pieces of evidence does not make them perfect pieces of evidence when compared to an authentic deed. Therefore, strengthening ownership rights to land can only be done by land registration. The formulation of the problem examined in this research is: 1) Why is it that many family heirlooms in Pariaman City have not been registered with the Land Office? 2) How is the inheritance of family heirlooms in the Pariaman City community? 3) How is the legal protection of heirs to family heirlooms that have not been registered in Pariaman City? The research methods that the author uses are normative juridical and empirical juridical. The types of data used are primary data and secondary data, obtained from interviews and document studies from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the author's findings are the causes of unregistered family heirloom land, namely the assumption that land rights certificates are not important, the difficulty of getting the approval of all family members, the difficulty of getting approval from the KAN Chairperson, registered family heirlooms tend to be taxed, the assumption that registered family heirlooms tend to become conflicts and disputes in the family. Inheritance of unregistered family heirloom land occurs by itself without carrying out an administrative process, i.e. the heirs can directly take physical control of the family heirloom land plot. The administrative process in government occurs when the inheritance of unregistered family heirloom land is registered by the heirs to the land office. The legal protection provided by the state, in this case the government to the heirs of unregistered family heirlooms, is given 2 (two) forms of legal protection, namely first is preventive legal protection in the form of registering and the second is repressive legal protection in the form of filing objections and lawsuits to the court.

Keywords: Legal Protection, family heirlooms, and Not Yet Registered.

